# IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN KEPULAUAN RIAU

Muhammad Riski Dwi Sah Putra
NPP. 33.0339
*Program Studi Studi Kebijakan Publik*
Email:Riskidwiputra579@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. A. Masrich, M.Si.
Email:andimasrich@ipdn.ac.id

## *ABSTRACT*

***Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):*** *The issue of uninhabitable housing (RTLH) in Karimun Regency remains a strategic problem closely related to poverty and low quality of life. Although the local government through the Housing and Settlement Agency has implemented housing rehabilitation programs, the achievements are still not optimal compared to the existing needs.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation process of the RTLH program, identify the obstacles encountered, and examine the efforts made to overcome these challenges.* ***Method:*** *This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The informants consist of officials from the Housing and Settlement Agency of Karimun Regency and other related stakeholders. Data analysis is conducted inductively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study applies the public policy implementation theory of Knill and Tosun, which includes six dimensions: policy instruments, policy design, control structure, institutional design, administrative capacity, and social acceptance.* ***Result:*** *The results show that the implementation of the RTLH program in Karimun Regency has been carried out but is not yet optimal. Major obstacles include limited budget, inadequate human resources, geographical challenges of island regions, delays in material distribution, and low community participation. In addition, there are issues related to inaccurate targeting of beneficiaries. Efforts made by the government include strengthening coordination, improving supervision, optimizing planning, and increasing community participation.* ***Conclusion:*** *In conclusion, the success of RTLH program implementation is highly influenced by institutional capacity, resource support, and social acceptance.*
***Keywords:*** *Policy Implementation, Uninhabitable Housing (RTLH), Housing, Community Welfare*

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):** Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun masih menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman telah melaksanakan program rehabilitasi RTLH, capaian program masih belum optimal dibandingkan jumlah kebutuhan yang ada. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi program RTLH, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang

dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Knill dan Tosun yang meliputi enam dimensi, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program RTLH di Kabupaten Karimun telah berjalan namun belum optimal. Beberapa hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum memadai, kendala geografis wilayah kepulauan, distribusi material yang terhambat, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam ketepatan sasaran penerima bantuan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain peningkatan koordinasi, penguatan pengawasan, optimalisasi perencanaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, keberhasilan implementasi program RTLH sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, dan penerimaan masyarakat
**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Perumahan, Kesejahteraan Masyarakat

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia (basic human need) yang penting untuk menjamin kehidupan yang aman, sehat, dan bermartabat. Hak atas tempat tinggal layak (adequate housing) dijamin secara konstitusional dan menjadi landasan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pencapaian SDGs Target 11.1 (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Namun, masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia masih mencerminkan ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural. RTLH merupakan hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan, sanitasi, dan akses air bersih sehingga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap masalah kesehatan dan ekonomi (Nurhayati & Setyanto, 2022). Dengan demikian, RTLH tidak hanya menjadi masalah fisik bangunan, tetapi juga indikator sosial yang memerlukan intervensi kebijakan terpadu.

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026, terdapat 9.935 RTLH dari total 695.659 KK di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga memiliki persentase RTLH tertinggi sebesar 9,49%, disusul Bintan 8,14%, sedangkan Karimun memiliki 1.167 RTLH dari 81.469 KK (Renstra Perkim Kepri, 2021–2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan RTLH masih signifikan, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti Lingga dan Bintan. Di Kabupaten Karimun, masalah RTLH berkaitan erat dengan tingginya angka kemiskinan. Data TNP2K menunjukkan lebih dari 11.000 KK miskin tersebar di Kecamatan Belat, Moro, dan Kundur, dengan sekitar 3.813 unit rumah masih tergolong tidak layak huni. Kondisi geografis Karimun sebagai wilayah kepulauan juga menyebabkan distribusi bahan bangunan dan infrastruktur dasar sering terkendala. Penyelesaian RTLH tidak cukup melalui renovasi fisik, tetapi juga membutuhkan reformasi kebijakan, legalisasi aset tanah, dan integrasi basis data RTLH agar bantuan tepat sasaran (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Rumah layak huni menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 harus memenuhi syarat keselamatan bangunan, kecukupan luas, kesehatan penghuni, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. BPS melalui Susenas 2019–2021 menetapkan empat aspek utama rumah layak huni, yaitu

ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak (BPS, 2019–2021). Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan program rehabilitasi RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini memberikan bantuan material bangunan dan pendampingan teknis kepada masyarakat miskin agar rumah memenuhi standar layak huni. Pada tahun 2023, Karimun hanya memperoleh 42 unit bantuan BSPS, paling rendah di Kepulauan Riau, meskipun masih terdapat 1.167 RTLH. Secara keseluruhan, BSPS di Kepri berhasil memperbaiki 1.450 unit rumah, tetapi jumlah tersebut masih jauh dari total kebutuhan perbaikan RTLH (detikProperti, 2023).

Selama periode 2017–2021, program BSPS di Karimun telah menyelesaikan 2.771 unit rumah di 12 kecamatan. Pada tahun 2022, pemerintah daerah kembali mengusulkan perbaikan 3.806 unit rumah di 11 kecamatan dan 50 desa/kelurahan melalui Kementerian PUPR. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin meskipun backlog RTLH masih cukup besar. Namun, implementasi program RTLH di Kabupaten Karimun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, anggaran terbatas, cuaca buruk, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterlambatan distribusi material ke pulau-pulau kecil. Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan menimbulkan kecemburuan sosial sehingga transparansi dan akuntabilitas program perlu ditingkatkan (Wulansari, 2023). Fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penentuan penerima BSPS juga menyebabkan miss-targeting dan inefisiensi anggaran (Firdaus, 2021).

Program RTLH memiliki urgensi strategis dalam mengurangi kemiskinan ekstrem karena perbaikan rumah dapat meningkatkan kesehatan, kenyamanan psikologis, dan produktivitas masyarakat. Keberhasilan implementasi program RTLH di Kabupaten Karimun dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, partisipasi masyarakat, ketepatan waktu, dan kesiapan SDM teknis. Penelitian ini memiliki contextual gap karena dilakukan pada wilayah kepulauan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, hambatan distribusi material di wilayah kepulauan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program perbaikan rumah. Permasalahan tersebut berdampak pada belum optimalnya capaian program RTLH dibandingkan jumlah kebutuhan rumah layak huni yang masih cukup tinggi di Kabupaten Karimun. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun masih memiliki 1.167 unit RTLH dengan kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan implementasi program rehabilitasi rumah menjadi lebih kompleks dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau (Renstra Perkim Kepri, 2021–2026). Selain itu, masih ditemukan persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat sehingga transparansi dan pengawasan program perlu ditingkatkan (Wulansari, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi maupun efektivitas program RTLH di berbagai daerah. Penelitian Nurdiana Priyatna, Purnamasari, dan Ramdani (2022) menyoroti efektivitas program Rutilahu di Kabupaten Karawang yang dinilai cukup berhasil meningkatkan jumlah rumah layak huni, meskipun masih terkendala sosialisasi dan distribusi bantuan. Penelitian

Buari, Humaizi, dan Kusmanto (2024) di Kabupaten Deli Serdang menekankan pentingnya koordinasi, dukungan sumber daya, dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi program RTLH. Sementara itu, Setyawan dan Prathama (2024) di Kota Surabaya lebih memfokuskan kajian pada pengawasan program dan kualitas hasil renovasi rumah. Penelitian lainnya oleh Najivanto dan Arif (2024) juga membahas implementasi program RTLH dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan, sedangkan Saputra dkk. (2024) menyoroti hambatan komunikasi antar dinas, legalitas tanah, dan keterbatasan anggaran dalam program rehabilitasi sosial RTLH di Kota Serang.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji implementasi dan efektivitas program RTLH, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas implementasi kebijakan RTLH pada daerah kepulauan dengan karakteristik geografis yang sulit dijangkau seperti Kabupaten Karimun. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada wilayah perkotaan atau daratan dengan fokus pada efektivitas program, koordinasi, maupun kualitas hasil renovasi. Sementara itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian (research gap) berupa contextual gap, yaitu perbedaan konteks sosial, ekonomi, geografis, dan administratif daerah kepulauan yang memengaruhi implementasi program RTLH. Penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Knill dan Tosun, khususnya terkait pilihan instrumen kebijakan, kapasitas administratif, desain kelembagaan, serta penerimaan sosial masyarakat dalam pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Karimun.

### 1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun masih menjadi persoalan yang berkaitan langsung dengan kemiskinan, kualitas hidup masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap hunian yang aman dan sehat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perumahan dan Permukiman telah melaksanakan program rehabilitasi RTLH melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, kendala geografis wilayah kepulauan, keterlambatan distribusi material, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, masih ditemukan persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi program Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini juga penting dilakukan mengingat Kabupaten Karimun memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang menyebabkan pelaksanaan program perumahan memiliki tantangan berbeda dibandingkan daerah lain, terutama dalam aspek distribusi bantuan, pengawasan, dan keterjangkauan wilayah pelayanan.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pihak terkait akan mengalami keterbatasan data empiris mengenai kondisi implementasi program RTLH secara faktual di lapangan. Akibatnya, perumusan kebijakan dan strategi perbaikan program berisiko kurang tepat sasaran, kurang efektif, serta tidak mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat penerima bantuan. Dampak lebih lanjutnya, upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin dapat berjalan kurang optimal, backlog RTLH berpotensi terus meningkat, dan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni menjadi sulit tercapai secara maksimal. Selain itu, tanpa adanya penelitian ini, hambatan-hambatan

implementasi yang terjadi berpotensi terus berulang karena tidak tersedia kajian yang dapat dijadikan dasar dalam memperbaiki koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan program secara berkelanjutan.

### 1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan publik, khususnya program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program RTLH memiliki variasi fokus, metode, pendekatan, serta konteks wilayah yang berbeda-beda. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran mengenai efektivitas program, hambatan implementasi, koordinasi kelembagaan, hingga partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program perbaikan rumah tidak layak huni.

Penelitian oleh Nurdiana Priyatna, Purnamasari, dan Ramdani (2022) berjudul Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Rutilahu cukup efektif dalam meningkatkan jumlah rumah layak huni, meskipun masih terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi dan ketimpangan distribusi bantuan antarwilayah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas program perbaikan rumah tidak layak huni melalui dinas perumahan daerah, namun berbeda pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada efektivitas program sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan program RTLH.

Selanjutnya, penelitian Buari, Humaizi, dan Kusmanto (2024) yang berjudul Implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RTLH memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar pihak yang belum optimal, dan keterbatasan alokasi dana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus implementasi program RTLH dan pentingnya koordinasi serta sumber daya. Perbedaannya terletak pada konteks wilayah penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.

Penelitian lain dilakukan oleh Setyawan dan Prathama (2024) dengan judul Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi RTLH di Surabaya telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan kendala pada kualitas hasil renovasi serta distribusi bantuan yang belum merata sehingga diperlukan pengawasan yang lebih optimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh pemerintah daerah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Surabaya lebih menekankan aspek pengawasan dan kualitas hasil renovasi, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi program oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun.

Penelitian Rizaldy Ananda Putra Najivanto dan Lukman Arif (2024) berjudul Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan

Asemrowo Kota Surabaya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berjalan cukup baik karena adanya kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan hambatan berupa keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan tenaga tukang bangunan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi program RTLH yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun perbedaannya terletak pada konteks wilayah penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan di wilayah perkotaan padat penduduk, sedangkan penelitian ini dilakukan di daerah kepulauan dengan karakteristik geografis yang berbeda.

Selain itu, penelitian Feriyansah Adi Saputra, Rahma Cantika Dewi, Aryo Hendrawan, Dewi Ratu Hapsari Jati, dan Firman Budhi Darmansyah (2024) yang berjudul Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial RTLH berhasil meningkatkan kualitas hunian masyarakat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa lemahnya komunikasi antar dinas, keterbatasan anggaran, dan masalah legalitas kepemilikan tanah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti implementasi program RTLH dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada model implementasi kebijakan yang digunakan serta kondisi wilayah penelitian.

Penelitian oleh Iril Pahmi (2013) mengenai Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan melalui RTLH di Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa program perbaikan rumah menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada fungsi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan program sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Kemudian penelitian Zalmi Hidayat (2016) tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni menjelaskan bahwa implementasi program RTLH membutuhkan koordinasi lintas sektor yang efektif, dukungan regulasi, dan pengawasan yang konsisten agar pelaksanaan program tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menekankan pentingnya komunikasi serta kapasitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wulansari (2023) mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan serta rendahnya transparansi informasi kepada masyarakat sehingga memunculkan kecemburuan sosial. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas hambatan implementasi program RTLH dan pentingnya akuntabilitas kebijakan publik. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi program rumah tidak layak huni umumnya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, komunikasi kebijakan, keterbatasan anggaran, dan partisipasi masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada efektivitas program, pengawasan, koordinasi, maupun kualitas hasil program. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan pada konteks wilayah penelitian, yaitu Kabupaten Karimun yang merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan geografis, distribusi material, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berbeda dibandingkan

penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian implementasi kebijakan program RTLH di daerah kepulauan.

### 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan geografis, distribusi material, dan keterbatasan akses antar pulau yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya dilakukan di wilayah perkotaan atau daratan seperti Karawang, Deli Serdang, Surabaya, dan Kota Serang yang lebih menitikberatkan pada efektivitas program, kualitas hasil renovasi, maupun koordinasi antar lembaga. Sementara itu, penelitian ini menekankan pada proses implementasi kebijakan dalam konteks daerah kepulauan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan administratif daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara lebih mendalam hambatan implementasi seperti keterbatasan anggaran, kendala distribusi bahan bangunan ke pulau-pulau kecil, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketepatan sasaran penerima bantuan dalam program RTLH di Kabupaten Karimun.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dari sisi teori dan fokus analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan model implementasi Van Meter & Van Horn maupun indikator efektivitas program, sedangkan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Knill dan Tosun yang menitikberatkan pada enam dimensi implementasi, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. Penggunaan teori tersebut memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menganalisis keberhasilan implementasi program RTLH, khususnya pada daerah kepulauan yang memiliki kompleksitas birokrasi dan tantangan pelayanan publik yang berbeda dibanding daerah lain. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian implementasi kebijakan perumahan sosial berbasis pemerintahan daerah, khususnya pada konteks wilayah kepulauan di Kabupaten Karimun.

### 1.6. Tujuan

Tujuan Penelitian Untuk menganalisis implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun, termasuk hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Metode deskriptif digunakan agar peneliti mampu menggambarkan fenomena implementasi kebijakan secara sistematis, faktual, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pemilihan metode ini dianggap tepat karena implementasi kebijakan publik tidak hanya dapat diukur melalui angka-angka, tetapi juga memerlukan pemahaman mengenai perilaku pelaksana kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta penerimaan masyarakat terhadap program tersebut (Moleong, 2018). Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Knill dan Tosun yang meliputi dimensi pilihan instrumen kebijakan, desain

kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial sebagai dasar analisis dalam memahami pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Karimun.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program RTLH, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat kondisi pelaksanaan program serta kondisi rumah penerima bantuan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, data RTLH, foto kegiatan, serta dokumen kebijakan terkait program. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan program RTLH. Informan penelitian terdiri dari aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun serta pihak terkait lainnya yang memahami proses implementasi program. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun karena memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan program, serta pengawasan pelaksanaan program RTLH. Selain itu, peneliti juga melibatkan pegawai teknis dinas, pihak kecamatan atau desa, serta masyarakat penerima bantuan agar memperoleh gambaran yang utuh dari sisi pelaksana maupun penerima manfaat program (Sugiyono, 2019).

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Tahapan tersebut dilakukan secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai instansi pelaksana Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, dimulai pada bulan September hingga Oktober 2025, yang mencakup kegiatan observasi awal, pengumpulan data lapangan, wawancara dengan informan, serta pengumpulan dokumen pendukung penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang aktual mengenai implementasi Program RTLH di Kabupaten Karimun.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Proses Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun

Implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun merupakan bagian dari kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian layak. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting yang menentukan keberhasilan kebijakan karena kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, proses pelaksanaan program RTLH dianalisis berdasarkan enam

dimensi implementasi kebijakan, yaitu instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan secara sistematis, namun masih menghadapi tantangan struktural dan kontekstual. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan pendataan, verifikasi, penetapan penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan anggaran, dan distribusi material menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi program.

### 3.1.1 Pilihan Instrumen Kebijakan (Choice of Policy Instruments)

Pilihan instrumen kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik karena menentukan bagaimana tujuan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Dalam program RTLH di Kabupaten Karimun, pemerintah daerah menggunakan pendekatan kombinatif antara kebijakan pusat dan daerah dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan.

Berdasarkan hasil wawancara, penentuan jenis bantuan dilakukan melalui survei lapangan untuk menilai kondisi atap, dinding, lantai, sanitasi, dan keamanan bangunan. Rumah dengan kerusakan berat memperoleh rehabilitasi total, sedangkan rumah dengan kerusakan sedang mendapatkan bantuan stimulan berupa material bangunan. Selain itu, penerima bantuan diverifikasi berdasarkan kondisi ekonomi, kondisi fisik rumah, dan kepemilikan lahan yang sah.

Instrumen kebijakan yang digunakan meliputi:

a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat
b. Pendanaan APBD daerah
c. Program TMMD sebagai kolaborasi lintas sektor
d. Swadaya masyarakat

**Tabel 1.**
Instrumen Kebijakan RTLH Kabupaten Karimun

| Instrumen Kebijakan | Sumber Pendanaan | Karakteristik | Peran dalam Implementasi |
|---|---|---|---|
| BSPS | APBN (Pusat) | Bantuan stimulan | Program utama nasional |
| APBD | Pemerintah Daerah | Bantuan langsung | Pelengkap dan penyesuaian lokal |
| TMMD | Kolaborasi TNI | Pembangunan fisik | Percepatan pembangunan |
| Swadaya | Masyarakat | Partisipatif | Dukungan tenaga & biaya |

Berdasarkan tabel 1. di atas, implementasi program RTLH menggunakan kombinasi instrumen kebijakan yang saling melengkapi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan multi-instrumen cukup efektif dalam mendukung realisasi program, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian kriteria kebijakan dengan kondisi lapangan, kendala geografis, dan ketergantungan terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian usulan bantuan tidak dapat direalisasikan karena status lahan dan ketidaksesuaian dengan RTRW wilayah pesisir.

### 3.1.2 Desain Kebijakan (Policy Design)

Desain kebijakan merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Program RTLH bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan tempat tinggal. Berdasarkan hasil wawancara, tujuan utama program RTLH adalah meningkatkan kualitas

hunian masyarakat dengan target yang disesuaikan berdasarkan jumlah RTLH dan kemampuan anggaran yang tersedia. Program telah dilaksanakan di berbagai kecamatan dan menunjukkan perubahan kondisi rumah dari tidak layak menjadi layak huni. Namun, pencapaian target belum optimal karena keterbatasan anggaran dan tingginya jumlah RTLH yang harus ditangani.

**Tabel 2.**

Desain Kebijakan Program RTLH Kabupaten Karimun

| Aspek Desain Kebijakan | Kondisi Ideal | Kondisi Aktual di Lapangan |
|---|---|---|
| Tujuan Program | Meningkatkan kualitas hunian layak | Tercapai sebagian |
| Target Program | Menjangkau seluruh RTLH | Terbatas oleh anggaran |
| Standar Teknis | Sesuai UU dan standar PUPR | Umumnya terpenuhi |
| Capaian Program | Optimal dan merata | Belum merata |

Berdasarkan tabel 2. di atas, desain kebijakan program RTLH telah dirancang sesuai standar normatif, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan bantuan bersifat stimulan sehingga masyarakat harus berpartisipasi melalui swadaya tenaga maupun biaya tambahan. Selain itu, distribusi material di wilayah kepulauan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan.

Tahapan pelaksanaan program meliputi:

a. Perencanaan dan pendataan RTLH
b. Verifikasi dan seleksi penerima bantuan
c. Penetapan penerima bantuan
d. Penyaluran bantuan
e. Pelaksanaan pembangunan
f. Monitoring dan evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara, tahapan pelaksanaan sudah berjalan sesuai prosedur, namun sering mengalami keterlambatan akibat kondisi geografis dan cuaca wilayah kepulauan. Hasil analisis menunjukkan bahwa desain kebijakan belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi kontekstual daerah kepulauan sehingga memengaruhi efektivitas implementasi program.

### 3.1.3 Struktur Pengawasan (Control Structure)

Struktur pengawasan merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan karena berfungsi memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam program RTLH di Kabupaten Karimun, pengawasan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman bersama perangkat desa dan pihak terkait lainnya melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan pada tahap awal, pertengahan, dan akhir pembangunan. Pengawasan mencakup:

a. Monitoring lapangan secara berkala
b. Evaluasi progres pekerjaan
c. Pengawasan partisipatif melalui masyarakat dan aparatur desa
d. Pelaporan administratif

Selain itu, dokumentasi progres pembangunan dilakukan melalui laporan berkala yang disertai foto sebelum dan sesudah pembangunan sebagai bukti fisik pelaksanaan program. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan menjadi alat kontrol administratif. Mekanisme pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemerintah desa atau langsung kepada dinas terkait, kemudian ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan dan evaluasi. Tindak korektif meliputi:

a. Perbaikan kualitas bangunan yang tidak sesuai standar

b. Peninjauan ulang penerima bantuan
c. Evaluasi pelaksanaan program di lokasi tertentu

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pengawasan telah berjalan cukup baik melalui monitoring, evaluasi, dan verifikasi lapangan. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena keterbatasan jumlah tenaga pengawas, luasnya wilayah kepulauan, serta belum adanya sistem pengawasan dan pengaduan berbasis digital yang terintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara, proses dokumentasi dan pelaporan masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat proses monitoring dan evaluasi program.

### 3.1.4 Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Desain kelembagaan merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan mekanisme koordinasi antar aktor dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun, desain kelembagaan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta lembaga non-pemerintah seperti TNI melalui program TMMD. Kondisi ini menunjukkan adanya collaborative governance dalam pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Perumahan dan Permukiman berperan sebagai pelaksana utama program, pemerintah desa sebagai pengusul dan pengawas lokal, sedangkan TNI melalui TMMD menjadi mitra pelaksana pembangunan fisik di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian peran antar lembaga sudah cukup jelas dan saling melengkapi dalam mendukung implementasi program RTLH.

**Tabel 3.**
Pembagian Peran Kelembagaan Program RTLH Kabupaten Karimun

| Aktor/Lembaga | Peran Utama | Fungsi dalam Implementasi |
|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Permukiman | Leading sector | Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan |
| Pemerintah Desa/Kelurahan | Pengusul & pengawas lokal | Pendataan, verifikasi, pengawasan |
| TNI (TMMD) | Mitra pelaksana | Pembangunan fisik RTLH |
| Masyarakat | Partisipan | Swadaya tenaga dan dukungan |

Berdasarkan tabel 3. di atas, implementasi program RTLH dilaksanakan melalui kolaborasi multi-aktor antara pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI, dan masyarakat. Koordinasi dilakukan secara vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa, serta secara horizontal antar instansi di tingkat daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan program, terutama untuk mengatasi kendala geografis wilayah kepulauan. Selain aspek koordinasi, program RTLH dilaksanakan berdasarkan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri PUPR terkait BSPS, serta peraturan daerah Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil wawancara, regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program, namun masih diperlukan penyesuaian terhadap kondisi wilayah kepulauan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek sinkronisasi data, implementasi program RTLH menggunakan integrasi data RTLH dan DTKS untuk menentukan penerima bantuan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat ketidaksesuaian data yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan data belum optimal sehingga masih berpotensi menimbulkan inclusion error dan exclusion error. Di sisi lain, kontribusi mitra seperti TNI melalui program TMMD memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan RTLH, khususnya di wilayah terpencil. Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi kelembagaan cukup efektif dalam mendukung implementasi program, namun masih memerlukan penguatan sinkronisasi data, koordinasi antar lembaga, serta pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

### 3.1.5 Kapasitas Administratif (Administrative Capacity)

Kapasitas administratif merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya, sistem administrasi, dan dukungan logistik untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Dalam implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun, kapasitas administratif cukup mendukung pelaksanaan program, namun masih menghadapi beberapa keterbatasan. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah SDM yang tersedia masih terbatas dan harus menangani berbagai tahapan mulai dari verifikasi hingga pelaporan. Selain itu, sistem administrasi masih bersifat semi-manual sehingga proses monitoring dan pelaporan belum optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan belum optimalnya digitalisasi administrasi menyebabkan proses pelaksanaan program berjalan lebih lambat dan meningkatkan risiko ketidaksesuaian data.

**Tabel 4.**
Kapasitas Administratif Program RTLH Kabupaten Karimun

| Aspek | Kondisi Ideal | Kondisi Aktual | Dampak |
|---|---|---|---|
| SDM | Cukup & kompeten | Terbatas & beban kerja tinggi | Proses lambat |
| Sistem Administrasi | Digital & terintegrasi | Semi-manual | Risiko data tidak akurat |
| Logistik | Distribusi lancar | Terhambat geografis | Keterlambatan pembangunan |
| Pelaporan | Tepat waktu | Kadang terlambat | Akuntabilitas menurun |

*Sumber: Data penelitian dan wawancara (2025)*

Berdasarkan tabel di atas, kapasitas administratif program RTLH masih menghadapi kendala pada aspek SDM, sistem administrasi, logistik, dan pelaporan. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah kepulauan Kabupaten Karimun menjadi faktor utama yang memengaruhi distribusi material pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, distribusi material sering mengalami keterlambatan akibat transportasi laut dan kondisi cuaca. Pengelolaan logistik dilakukan secara bertahap sesuai progres pembangunan, namun keterbatasan aksesibilitas wilayah menyebabkan distribusi material tidak selalu berjalan lancar. Selain itu, pengawasan kualitas bahan bangunan juga menjadi tantangan karena bergantung pada ketersediaan material lokal.

Risiko utama dalam implementasi program meliputi:

a. Keterlambatan pelaksanaan akibat cuaca dan distribusi material
b. Keterbatasan anggaran
c. Ketidaksesuaian data penerima bantuan
d. Keterlambatan pelaporan administrasi

Berdasarkan hasil wawancara, meskipun terdapat berbagai risiko, secara umum program RTLH masih dapat diselesaikan sesuai target setiap tahunnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas administratif sudah cukup mendukung pelaksanaan program, namun masih perlu peningkatan pada penguatan SDM, digitalisasi sistem administrasi, dan perbaikan pengelolaan logistik agar implementasi program lebih efektif dan efisien.

### 3.1.6 Penerimaan Sosial (Social Acceptance)

Penerimaan sosial merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan tingkat penerimaan, dukungan, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat. Dalam implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun, penerimaan sosial masyarakat tergolong baik karena program memberikan perubahan nyata terhadap kondisi hunian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat penerima bantuan merasa puas karena rumah

yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih aman, nyaman, dan sehat untuk ditinggali. Hasil analisis menunjukkan bahwa program RTLH tidak hanya memberikan dampak fisik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan psikologis masyarakat. Dokumentasi program TMMD juga menunjukkan perubahan kondisi rumah dari sebelum dan sesudah pembangunan menjadi lebih layak huni.

**Tabel 5.**
Realisasi Program RTLH dan Dampak Sosial

| Tahun | Sumber Program | Lokasi | Nilai Anggaran | Dampak Sosial |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | APBD | Selat Gelam | Rp271.926.000 | Peningkatan kualitas hunian |
| 2023 | APBD | Kundur | Rp380.000.000 | Perbaikan kondisi rumah |
| 2024 | TMMD | Selat Gelam | Rp450.000.000 | Hunian lebih layak |
| 2025 | APBD/TMMD | Tebing, Durai, Buru | Rp270.000.000 | Kesejahteraan meningkat |

*Sumber: Data RTLH Kabupaten Karimun*

Berdasarkan tabel di atas, program RTLH dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan APBD dan TMMD di beberapa wilayah Kabupaten Karimun. Hasil analisis menunjukkan bahwa program memberikan dampak positif terhadap kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Selain tingkat kepuasan, penerimaan sosial juga terlihat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah melalui tenaga kerja dan tambahan material. Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan masyarakat menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan serta memperkuat nilai gotong royong.

Namun demikian, persepsi keadilan masih menjadi tantangan dalam implementasi program. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat merasa belum mendapatkan bantuan meskipun dianggap layak menerima, sehingga menimbulkan potensi kecemburuan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbatasan kuota bantuan dan ketidaktepatan sasaran menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan program.

Keluhan masyarakat umumnya berkaitan dengan:

a. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan
b. Keterlambatan pelaksanaan program
c. Keterbatasan jumlah bantuan

Keluhan tersebut biasanya diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah mencerminkan adanya nilai social capital dan kerja sama sosial yang masih kuat di masyarakat. Dalam aspek keberlanjutan program, pemeliharaan rumah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat umumnya menjaga rumah yang telah dibangun karena mereka terlibat langsung dalam proses pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkontribusi terhadap keberlanjutan program RTLH dalam jangka panjang. Dengan demikian, penerimaan sosial terhadap program RTLH di Kabupaten Karimun dapat dikatakan positif karena program mampu meningkatkan kualitas hunian, kesejahteraan masyarakat, dan solidaritas sosial. Namun, peningkatan transparansi, pemerataan bantuan, dan komunikasi kebijakan masih diperlukan agar implementasi program lebih efektif dan berkelanjutan.

### 3.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun

Implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas dan pencapaian tujuan program. Hambatan implementasi dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya,

desain kebijakan yang kurang adaptif, serta kondisi sosial dan geografis wilayah kepulauan. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan data empiris, hambatan implementasi program RTLH dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek utama.

1. Keterbatasan Anggaran dan Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Riil
   Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dibandingkan jumlah rumah tidak layak huni yang harus ditangani. Bantuan yang diberikan bersifat stimulan sehingga belum mampu menutupi seluruh kebutuhan pembangunan atau rehabilitasi rumah. Berdasarkan hasil wawancara, bantuan yang diberikan masih terbatas sehingga belum semua masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara target program dengan realisasi di lapangan karena banyak masyarakat yang memenuhi kriteria belum mendapatkan bantuan akibat keterbatasan kuota.
2. Ketidaktepatan Sasaran dan Permasalahan Data
   Hambatan lain adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat ketidaksesuaian data. Sinkronisasi antara data RTLH dan data kemiskinan seperti DTKS belum berjalan optimal sehingga masih ditemukan penerima bantuan yang kurang sesuai dengan kriteria atau masyarakat yang layak justru belum menerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat data yang tidak sinkron sehingga penetapan penerima bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Selain itu, legalitas lahan juga menjadi kendala karena beberapa usulan bantuan tidak dapat direalisasikan akibat status lahan yang tidak jelas atau tidak sesuai RTRW, terutama di wilayah pesisir. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan data tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga aspek regulasi.
3. Kendala Geografis dan Distribusi Logistik
   Kabupaten Karimun sebagai wilayah kepulauan menghadapi hambatan geografis dalam pelaksanaan program RTLH. Distribusi material pembangunan harus dilakukan melalui jalur laut dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pembangunan dan memengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Selain itu, biaya distribusi material di wilayah kepulauan lebih tinggi sehingga berdampak pada keterbatasan anggaran program. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor geografis menjadi hambatan utama dalam distribusi logistik dan pengawasan lapangan, terutama di daerah pulau yang aksesnya terbatas.
4. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Administrasi
   Hambatan berikutnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem administrasi yang belum sepenuhnya modern. Aparatur yang terlibat harus menangani berbagai tahapan program secara bersamaan mulai dari verifikasi data hingga pelaporan administrasi. Selain itu, sistem administrasi yang masih semi-manual menyebabkan monitoring, pelaporan, dan verifikasi data menjadi kurang efisien. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum optimalnya digitalisasi administrasi menyebabkan proses pengelolaan data dan pelaporan program berjalan lebih lambat dan kurang efektif.
5. Keterbatasan Pengawasan dan Sistem Pengaduan
   Pengawasan program RTLH telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, namun masih menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pengawas dan luas wilayah kerja. Hal ini menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh lokasi program. Selain itu, sistem pengaduan masyarakat masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi secara digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas penanganan keluhan masyarakat sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan respons pemerintah. Keterbatasan sistem pengawasan dan pengaduan dapat mengurangi akuntabilitas program dan meningkatkan potensi penyimpangan implementasi kebijakan.
6. Persepsi Ketidakadilan dan Keterbatasan Sosialisasi

Hambatan sosial yang muncul adalah persepsi ketidakadilan akibat keterbatasan jumlah bantuan. Tidak semua masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi dan sosialisasi program masih perlu ditingkatkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh mekanisme dan kriteria penerima bantuan sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan terhadap pelaksanaan program.

Hambatan implementasi program RTLH di Kabupaten Karimun dapat dikategorikan menjadi:

a. Faktor internal, seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan sistem administrasi
b. Faktor eksternal, seperti kondisi geografis dan cuaca
c. Faktor sosial, seperti persepsi keadilan dan partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil analisis, hambatan implementasi program RTLH bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor administratif, teknis, dan sosial. Meskipun program telah berjalan cukup baik, masih diperlukan perbaikan pada aspek kapasitas, sistem administrasi, pengawasan, koordinasi, dan transparansi agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

### 3.3 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun

Dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun, berbagai hambatan mendorong pemerintah daerah melakukan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Upaya yang dilakukan menunjukkan pendekatan yang responsif dan kolaboratif, meliputi perbaikan data, peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas, dan optimalisasi partisipasi masyarakat.

1. Peningkatan Akurasi Data dan Verifikasi Lapangan

   Pemerintah daerah melakukan peningkatan kualitas data penerima bantuan melalui verifikasi lapangan yang lebih ketat dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat setempat. Upaya ini bertujuan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan kondisi ekonomi dan kondisi rumah. Selain itu, dilakukan sinkronisasi data antara data RTLH dan DTKS.

   Upaya yang dilakukan meliputi:

   a. Verifikasi langsung ke lokasi rumah calon penerima
   b. Koordinasi dengan pemerintah desa dalam validasi data
   c. Penyesuaian data dengan kondisi aktual di lapangan

   Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan validitas data membantu meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan sosial.

2. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga

   Untuk mengatasi kendala kelembagaan dan pelaksanaan di lapangan, pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Permukiman, pemerintah desa, dan TNI melalui program TMMD. Pendekatan kolaboratif ini dilakukan melalui rapat rutin, komunikasi antar instansi, dan kerja sama pelaksanaan pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga membantu mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif.

3. Optimalisasi Sumber Pendanaan dan Skema Swadaya

   Pemerintah daerah melakukan optimalisasi sumber pendanaan dengan mengombinasikan APBD, program BSPS, dan program TMMD. Selain itu, pendekatan swadaya masyarakat terus didorong agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan rumah.

   Beberapa bentuk upaya yang dilakukan:

a. Mendorong kontribusi tenaga kerja masyarakat
b. Pemanfaatan sumber daya lokal
c. Penguatan gotong royong dalam pembangunan

Berdasarkan hasil analisis, pendekatan swadaya membantu mengurangi beban anggaran sekaligus meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Perbaikan Sistem Administrasi
   Pemerintah daerah melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang terlibat dalam program RTLH untuk meningkatkan kapasitas SDM. Selain itu, terdapat upaya perbaikan sistem administrasi melalui penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelaporan program. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem administrasi yang lebih modern dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan program.
5. Perbaikan Pengelolaan Logistik dan Penyesuaian dengan Kondisi Geografis
   Untuk mengatasi kendala distribusi material di wilayah kepulauan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian strategi logistik melalui pengaturan waktu distribusi sesuai kondisi cuaca dan pemanfaatan jalur distribusi yang lebih efisien. Selain itu, dilakukan pengawasan kualitas bahan bangunan agar sesuai standar. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyesuaian strategi logistik membantu mengurangi keterlambatan distribusi material dan mendukung kualitas pembangunan rumah.
6. Peningkatan Transparansi dan Sosialisasi Program
   Pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan sosialisasi program melalui penyampaian informasi mengenai kriteria penerima bantuan, mekanisme pelaksanaan, dan hasil kegiatan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui pemerintah desa, pertemuan masyarakat, dan pemasangan papan informasi di lokasi kegiatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi yang baik membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program dan mengurangi potensi konflik sosial. Berdasarkan uraian di atas, upaya mengatasi hambatan implementasi program RTLH di Kabupaten Karimun menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif pada aspek data, kelembagaan, sumber daya, dan sosial. Meskipun masih terdapat keterbatasan, langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah mampu mendukung pelaksanaan program secara lebih optimal. Ke depan, diperlukan penguatan digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi agar implementasi program RTLH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun, ditemukan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah kepulauan, keterlambatan distribusi material, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, kapasitas kelembagaan, serta dukungan masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Sama halnya dengan temuan penelitian Buari, Humaizi, dan Kusmanto (2024) bahwa implementasi program RTLH sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar pihak dan dukungan sumber daya yang memadai, penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya koordinasi dan keterbatasan SDM menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program RTLH di Kabupaten

Karimun. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Setyawan dan Prathama (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan dan distribusi bantuan masih menjadi kendala dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hal tersebut terlihat pada masih adanya keterlambatan distribusi material bangunan ke wilayah pulau-pulau kecil di Kabupaten Karimun sehingga proses pembangunan sering melebihi target waktu pelaksanaan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi program RTLH di Kabupaten Karimun memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena dipengaruhi oleh kondisi wilayah kepulauan yang memiliki akses geografis lebih sulit dibanding daerah perkotaan. Berbeda dengan temuan Najivanto dan Arif (2024) di Kota Surabaya yang menyatakan bahwa hambatan utama program RTLH lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan tukang bangunan dan pencairan dana, penelitian ini menunjukkan bahwa kendala distribusi material dan akses transportasi laut menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas program di Kabupaten Karimun. Temuan ini juga memperkuat penelitian Saputra dkk. (2024) bahwa keterbatasan anggaran dan lemahnya komunikasi antar lembaga masih menjadi persoalan dalam implementasi program RTLH. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya upaya pemerintah daerah melalui peningkatan pengawasan, optimalisasi perencanaan, serta penguatan partisipasi masyarakat sebagai bentuk solusi untuk mengatasi hambatan implementasi program. Dengan demikian, keberhasilan program RTLH di Kabupaten Karimun tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sinergi kelembagaan, memperkuat kapasitas administrasi, dan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi sosial serta geografis wilayah kepulauan

### 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karimun tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan kondisi geografis wilayah kepulauan, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat serta ketepatan pendataan penerima bantuan. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan hambatan distribusi material ke pulau-pulau kecil turut memperlambat proses pembangunan rumah. Di sisi lain, adanya koordinasi antarinstansi, pengawasan dari pemerintah daerah, serta semangat gotong royong masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program RTLH sehingga program tetap dapat berjalan meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun telah berjalan cukup baik melalui pelibatan berbagai pihak dan penggunaan beberapa instrumen kebijakan, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, ketidaktepatan data penerima bantuan, kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya transparansi program. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut telah dilakukan melalui peningkatan verifikasi data, penguatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi sumber pendanaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan transparansi program, meskipun masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program RTLH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Karimun serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman tanpa membahas secara mendalam dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan di wilayah lain dengan karakteristik berbeda serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas program RTLH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Najivanto, R. A. P., & Arif, L. (2024). Implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya. Hudan Lin Naas, 5(2), 238–249. https://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index

Saputra, F. A., Dewi, R. C., Hendrawan, A., Jati, D. R. H., & Darmansyah, F. B. (2024). Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Contemporary Public Administration Review (CoPAR), 2(1), 47–65. https://doi.org/10.26593/copar.v2i1.8089.47-65

Wulansari, R. (2023). "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat." Jurnal Kebijakan Publik. Diakses pada 11 September 2025 dari https://media.neliti.com/media/publications/346873-implementasi-kebijakan-rehabilitasi-ruma-9b8a4af7.pdf

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia 2021. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (Dipublikasikan 2021)

Nurhayati, R. & Setyanto, H. (2022). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah dalam Mendukung Program Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 23(1), 35-48. (Dipublikasikan 2022)

https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/765.

Mutiah, Rahmah W. (2021). "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah." Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis 5(2): 300-314. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/download/403/333

Hidayat, Hudan Linnaas. (2024). "Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Mengatasi Permukiman Kumuh." Jurnal Unia 19: 120-137. https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/view/1729

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2024). "Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Rumah Tidak Layak Huni." Kementerian PUPR. Diakses pada 11 September 2025 dari https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jgp/article/download/5326/pdf_1

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi." BPS Statistik Indonesia. Diakses pada 11 September 2025 dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0MSMy/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html

Buari, S., Humaizi, & Kusmanto, H. (2024). Implementasi program bedah rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Perspektif, 13(3), 891–900. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.12250

Nurdiana Priyatna, N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang (Studi kasus pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). Jurnal Pemerintahan dan Politik, 7(3), 29–41.

Setyawan, J. A. P., & Prathama, A. (2024). Implementasi kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Surabaya (Studi kasus Kelurahan Sawunggaling). Jurnal Dinamika Pemerintahan, 7(1), 70–87.

Hardani. (2020). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. (2011). Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Zalmi. (2016). "Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Dinas Sosial di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus di Kecamatan Moro)." Jurnal Sosial dan Pemerintahan 3(1): 45-60. https://media.neliti.com/media/publications/33026-ID-pelaksanaan-program-rehabilitasi-sosial-rumah-tidak-layak-huni-rs-rtlh-oleh-dina.pdf

Pratiwi, Indah. (2024). "Responsivitas Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Rumah Tidak Layak Huni Melalui Program Bedah Rumah di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan." Jurnal Paradigma 12(2): 134-150. https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/14869

Sari, Dewi. (2024). "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kasemen Kota Serang." CoPAR 10(1): 78-95. https://journal.unpar.ac.id/index.php/CoPAR/article/view/8089

Rahman, Budi. (2024). "Implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara." JIANE 15(1): 56-72. https://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JIANE/article/view/6449

Indriani, Maya. (2023). "Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi." Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan 9(1): 89-104. https://jurnal.stisipwidyapuri-smi.ac.id/index.php/jdp/article/view/76

Wulandari, Siti. (2021). "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban." Publika 7(3): 210-225. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/38344

Simangunsong, Bonggo. (2017). "Sumber Data dalam Penelitian Kualitatif Pemerintahan." Sumber Ilmiah Online. Diakses pada 13 September 2025 dari https://repository.uin-suska.ac.id/9190/1/2013_2013242ADN.pdf

Sugiyono. (2018). "Metode Penelitian Kualitatif." Alfabeta Digital. Diakses pada 13 September 2025 dari https://www.alfabeta.co.id

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2020). "Analisis Data Kualitatif." Dalam Hardani, Analisis Data Kualitatif. Rajawali Pers. Diakses pada 13 September 2025 dari https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data

Syafi'ie, Inu Kencana. (2003). Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Usiono. (2016). Pemerintahan Daerah dan Otonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, A., & Setiawan, H. (2019). Dimensi Pemerintahan: Teori dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Journal of Indonesian Public Administration.

Fauzan, R., & Kurniawan, D. (2021). "Kajian Etimologi Istilah Pemerintahan dalam Kajian Ilmu Politik." Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 5(1), 45-61. https://penerbitdeepublish.com/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-jurnal/

Zalmi Hidayat. (2016). "Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau." Universitas Riau. https://media.neliti.com/media/publications/33026-ID-pelaksanaan-program-rehabilitasi-sosial-rumah-tidak-layak-huni-rs-rtlh-oleh-dina.pdf

Syanistri, R. (2020). "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps/article/view/178

Wahyu Kusumawardani, M., Muzzazinah, & Murni Ramli. (2021). "Mitotic and Karyotype of Indigofera suffruticosa Mill. in Central Java." Floribunda, 6(6), 213-219. http://www.ptti.or.id/journal/index.php/Floribunda/article/view/349/298

Inilri Pahmi. (2013). Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun 2011). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses pada 29 Oktober 2025 dari https://repository.uin-suska.ac.id/9190/1/2013_2013242ADN.pdf

Zulaekah, S., Sumarno, & Hawa, S. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI BAZNAS DI KAB. KARIMUN. Jurnal Al Muharrik Karimun. Diakses dari https://e-journal.stitmumtaz.ac.id/index.php/almuharrik/article/view/169

Dewi, R. (2024). "Pelatihan Penggunaan Beberapa Reference Manager untuk Melakukan Sitasi dan Penyusunan Daftar Pustaka di Kelompok Mahasiswa Kelurahan Bulusan Tembalang Semarang." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 12(2). Diakses dari https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps/article/view/178